

IMPLEMENTASI PROGRAM BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA) DI DESA SIDOMOJO KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

Oleh:

KUSNUL KHULUQIN NAINI
1720220100093

Pendahuluan

- Pengembangan desa diperlukan untuk memajukan ekonomi desa. Dalam membantu pengembangan desa maka pemerintah membuat peraturan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat BUMDes) [1]. Dimana BUMDes tersebut dapat menjadi salah satu alat yang dapat menggali potensi dan memajukan suatu desa. Pendirian BUMDes pada saat ini harus dilakukan, karena dapat meningkatkan produktivitas desa dan pada akhirnya dapat meningkatkan perokonomian masyarakat.
- Pendirian BUMDes terdapat beberapa tahapan : Pertama, pemerintah desa dan masyarakat bersepakat mendirikan BUMDes. Selanjutnya yang kedua, diadakan pengelolaan BUMDes dan penetapan persyaratan pemegang jabata. Ketiga, mulai dilakukannya monitoring serta evaluasi, Kemudian, yang terakhir dilaksanakan pelaporan pertanggungjawaban oleh pengelola.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- 1. Bagaimana implementasi program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Sidomojo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ?**
- 2. Aa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Sidomojo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ?**

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif menurut (Nurwegah, 2015). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku. Persepsi, motifasi, tindakan, dll. Secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Hasil

Saat ini, Pemerintah Desa Sidomojo membuat program BUMDes yang mulai didirikan pada tahun 2016. Dalam pelaksanaan program, komunikasi menjadi hal penting. Menurut Rudolf F Verderber, komunikasi memiliki fungsi yakni fungsi sosial dan fungsi pengambilan keputusan. Fungsi sosial bertujuan untuk kesenangan, menunjukkan ikatan, membangun dan memelihara hubungan dengan orang lain. Sedangkan fungsi pengambilan keputusan ialah memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan terhadap sesuatu pada saat tertentu

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak desa yaitu berupa musyawarah dan juga sosialisasi BUMDes. Selain itu, Pemerintah Desa Sidomojo membantu untuk mensosialisasikan segala kegiatan BUMDes Makmur Jaya dengan cara tidak formal, maksudnya yaitu melalui iklan, banner dan pamflet untuk menyebarkan informasi jenis usaha yang dilakukan BUMDes tersebut melalui media sosial. Untuk menyampaikan teknis pengelolaan BUMDes dengan jenis usaha pengelolaan sampah, pihak pengurus BUMDes dan perangkat Desa Sidomojo melakukan musyawarah desa bersama dengan RT dan RW yang bertempat tinggal di desa tersebut. Dalam tingkat pemahaman masyarakat mengenai informasi BUMDes,

Pembahasan

- Implementasi program BUMDes di Desa Sidomojo secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dari berjalannya program-program utama BUMDes secara baik. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan dan diperbaiki. Berdasarkan Peraturan Desa No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan BUMDes yaitu, meningkatkan perekonomian Desa Sidomojo melalui kegiatan usaha BUMDes dan meningkatkan pengolahan potensi desa. Bahkan sumber daya yang dimiliki BUMDes berasal dari bantuan pemerintah dan pengguna usaha unit ruko dan TPST. Karena banyaknya volume sampah membuat unit TPST menghasilkan keuntungan yang terbilang cukup banyak. Upah yang diberikan kepada anggota unit TPST berkisar Rp. 1.800.000,- hingga Rp. 2.500.000,- (tidak sesuai dengan UMR). Hal itu tergantung dengan keuntungan yang didapat setiap bulannya. Dari upah tersebut, 10% digunakan untuk asuransi anggota TPST [12].
- Sedangkan sumber daya manusia yang ada di BUMDes Sidomojo ini terbilang kurang, hal tersebut karena belum adanya ketua tetap untuk BUMDes. Dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 ketua BUMDes diangkat oleh kepala desa, setelah diangkat ketua BUMDes akan memilih pengurus pembantunya. Serta masih ada 1 (satu) unit yang belum memiliki anggota dan hanya ada kepala unit saja. Hingga saat ini pengurus BUMDes merupakan staff desa yang menjabat sebagai perangkat desa juga. Sehingga dengan adanya hal tersebut, membuat pekerjaan perangkat desa menjadi 2 (dua) kali lipat dari semestinya. Pada kenyataannya di lapangan para unit pelaksana merasa kekurangan orang untuk membantu pekerjaan mereka

Temuan Penting Penelitian

Dalam menganalisis pelaksanaan BUMDes dengan teori Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sumber daya dan komunikasi selalu menjadi hal utama dalam pelaksanaan suatu program. Seperti pada penelitian terdahulu Happy Liow, Florence D.J. Lengkong dan Novie Palar (2018) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan, bahwa permasalahan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mengelola badan usaha, serta kurangnya dana dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung program BUMDes dapat mempengaruhi pelaksanaan BUMDes.

Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya dalam konsen Implementasi Badan Usaha Milik Desa untuk mengembangkan potensi desa.

Referensi

UU, “Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat BUMDes,” 2014. *[Online]*

Amirya, Mirna. 2021. Peran BUMDes Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi desa. Retrieved Oktober

25, 2022, from iaijawatimur.or.id : <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/21>

Desa, D. P. 2020. Data Badan Usaha Milik Desa . Retrieved Oktober 23, 2022 Data Desa Center:

<https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id/>

Wijaya & Sari. (2019). Encouraging Collaborative Governance un Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Management in Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 9(2). Retrieved from <https://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/11763>

UU, “Nomor 15 Tahun 2019 mengenai pembentukan dan pengelolaan BUMDes,” 2019. *[Online]*

Arista, V.D. (2022). Tahun Ini Jumlah BUMDes di Sidoarjo Naik Jadi 237. Retrieved from radarsidoarjo :

<https://radarsidoarjo.jawapos.com/ekonomi-bisnis/09/03/2022/tahun-ini-jumlah-bumdes-di-sidoarjoditargetkan-naik-jadi-237/>

Nurwega. “ Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif,” 2015. *[Online]*

Edward III. (1980). *Implementation Public Policy.* Washington DC : Congressional. Quarter Press. Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik.*

Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakary

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3.* USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Kristiani, Murni. 2021. Pengertian Komunikasi Menurut Para Ahli. Retrieved Oktober 25, 2022, from kemdikbud.go.id : <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/forum/discuss.php?d=5337>

Perdes, “Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan BUMDes yaitu, meningkatkan perekonomian Desa Sidomojo melalui kegiatan usaha BUMDes dan meningkatkan pengolahan potensi desa,” 2013. *[Online]*

